



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUNARNO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 845651

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **419.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/161 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 156.000.000
2. Tanah Seluas 25000 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 263.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **115.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125TD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA GLM II Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA L1F02N37L1A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **3.985.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **3.100.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **541.085.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **541.085.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.